

TERAS UTAMA

Analisis Ekonomi Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar

PILIHAN kata Mas Menteri (pangilan untuk Nadiem Makarim Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI) tentang Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar pada Permendikbud No 3 Tahun 2020 sangat



Asyari
Wakil Rektor
I IAIN Bukittinggi

jantan. Selain memagnet perhatian, kata itu juga menantang. Dunia pendidikan diharapkan tidak lagi menjadi sumber penciptaan pengangguran terdidik. Isu pengangguran mendapat tempat dalam kebijakan ini. Dunia pendidikan terutama perguruan tinggi berkemas merespons kebijakan Mas Menteri. Berbagai *action*, seperti redesain kurikulum untuk mengikuti "*arus baru*" kampus merdeka dan merdeka belajar dilakukan.

Tulisan ini mencoba melakukan analisis kebijakan Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar dari sisi ekonomi yang relatif sedikit menjadi perhatian. Monopoli perhatian ada pada sisi pendidikan. Mengingat soal pengangguran (*unemployment*) kait-berkeliand dengan ekonomi, maka penting pula sisi ini diperhatikan.

► Baca Analisis...Hal 7

Analisis Ekonomi Kampus Merdeka...

Sambungan dari hal. 1

Kurikulum Bukan Variabel Tunggal

Masalah pengangguran (*unemployment*) sering dijadi-

kan isu sentral dan argumen bekerja atau "berjodoh" dengan dunia kerja atau dunia industri

ternyata kurang "mangkas". Proporsi perhatian yang lebih pada aspek kurikulum secara berturut-turut yang berkaitan dengan variabel yang berpengaruh pada pengangguran me-

masang tidak salah. Namun tidak sepenuhnya tepat. Ada variabel lain yang kurang diperhatikan

kan dan bahkan Avars "tentu-upr" oleh fokus secara massif pada kurikulum. Kemampuan pemerintah untuk menyediakan

kan lapangan kerja juga penting diperhatikan. Lulusan du-

nya pendidikan yang terus bertambah menurut deret ukur

dan kemampuan menyediakan kan atau menciptakan lapa-

ngan kerja baru menurut deret hitung. Hal ini juga menjadi

embrio yang berkontribusi pada pengangguran.

Selain itu kebijakan pemertintah mempengaruhi usia

mentah mempengaruhi usia masuk pada sektor tentu di

kalangan ASN dan pejabat negara, seperti amanat Un-

daug-Undang Sistem Nasional Ilmu Pengerahan dan Tekno-

logi (UU Sinas Iprek) yang dalam implementasi kebijakan

diambil hinggga 70 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014

tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) di antaranya tentang

terkait dengan pengurangan angka pengangguran. Langkah

pergantian kurikulum yang diharapkan dapat memperbaiki

"nasib" tamatan PT agar dapat mengatasi masalah

sekolah. Selama kegiatan tersebut berlangsung dan dilakukan

rekognisi. Bila dicermati kebijakan ini secara substansi telah ada di

kurikulum dan proses PBM sebelumnya, seperti program

magang dan PPL. Namun hal ini tidak sepenuhnya tepat. Ada variabel

rus diakui belum maksimal. Variasi kebijakan ini diawasi-

terkan akan menambatkan wajah dipartasi dalam dunia

pendidikan. Setiap peserta didik tentu sangat berkeinginan

meningkatkan dan mengakti-kan pengalaman belajar semaksimal

mal mungkin untuk modal belajar akses ke dunia kerja. Na-

mun karena keterbatasan ekonomi dan gonta-ganti kurikulum

ditambah menurut deret ukur dan kemampuan menyediakan

kan atau menciptakan lapangan kerja baru menurut deret

hitung. Hal ini juga menjadi embrio yang berkontribusi

pada pengangguran. Selain itu kebijakan pemertintah mempengaruhi usia

mentah mempengaruhi usia masuk pada sektor tentu di

kegiatan belajar di luar kampus dapat dalam bentuk magang,

proyek desa, pertukaran pelajar, penelitian, wirausaha, stu-

di/proyek independen, proyek kemanusiaan dan mengajar di

sekolah. Selama kegiatan tersebut berlangsung dan dilakukan

rekognisi. Bila dicermati kebijakan ini secara substansi telah ada di

kurikulum dan proses PBM sebelumnya, seperti program

magang dan PPL. Namun hal ini tidak sepenuhnya tepat. Ada variabel

rus diakui belum maksimal. Variasi kebijakan ini diawasi-

terkan akan menambatkan wajah dipartasi dalam dunia

pendidikan. Setiap peserta didik tentu sangat berkeinginan

meningkatkan dan mengakti-kan pengalaman belajar semaksimal

mal mungkin untuk modal belajar akses ke dunia kerja. Na-

mun karena keterbatasan ekonomi dan gonta-ganti kurikulum

ditambah menurut deret ukur dan kemampuan menyediakan

kan atau menciptakan lapangan kerja baru menurut deret

hitung. Hal ini juga menjadi embrio yang berkontribusi

pada pengangguran. Selain itu kebijakan pemertintah mempengaruhi usia

mentah mempengaruhi usia masuk pada sektor tentu di

yang akan meleleh oleh wah

di awal merupakan barang "mewah" bergeser menjadi ba-

rang primer. Dengan dibertakan hak be-

lajar dan PT memfasilitasi kuliah di luar PT dalam kelas me-

nimbulkan *cost* baru selain UKT harus dibayar di PT asal

UKT tidak peserta tidak bersta-riksa aktif. Di tengah kemam-

puan dan latar belakang ekonomi peserta didik yang ber-

variasi kebijakan ini diawasi-terkan akan menambatkan

wajah dipartasi dalam dunia pendidikan. Setiap peserta didik

tentu sangat berkeinginan meningkatkan dan mengakti-

kan pengalaman belajar semaksimal mal mungkin untuk modal

belajar akses ke dunia kerja. Namun karena keterbatasan

ekonomi dan gonta-ganti kurikulum ditambahkan menurut

deret ukur dan kemampuan menyediakan kan atau menciptakan

lapangan kerja baru menurut deret hitung. Hal ini juga menjadi

embrio yang berkontribusi pada pengangguran. Selain itu

kebijakan pemertintah mempengaruhi usia mentah mempengaruhi

usia masuk pada sektor tentu di

tegang pergantian kurikulum

angka pengangguran. Langkah

pergantian kurikulum yang diharapkan dapat memperbaiki

"nasib" tamatan PT agar dapat mengatasi masalah

sekolah. Selama kegiatan tersebut berlangsung dan dilakukan

rekognisi. Bila dicermati kebijakan ini secara substansi telah ada di

kurikulum dan proses PBM sebelumnya, seperti program

magang dan PPL. Namun hal ini tidak sepenuhnya tepat. Ada variabel

rus diakui belum maksimal. Variasi kebijakan ini diawasi-

terkan akan menambatkan wajah dipartasi dalam dunia

pendidikan. Setiap peserta didik tentu sangat berkeinginan

meningkatkan dan mengakti-kan pengalaman belajar semaksimal

mal mungkin untuk modal belajar akses ke dunia kerja. Na-

mun karena keterbatasan ekonomi dan gonta-ganti kurikulum

ditambah menurut deret ukur dan kemampuan menyediakan

kan atau menciptakan lapangan kerja baru menurut deret

hitung. Hal ini juga menjadi embrio yang berkontribusi

pada pengangguran. Selain itu kebijakan pemertintah mempengaruhi usia

mentah mempengaruhi usia masuk pada sektor tentu di